

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang penting dan mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro (Simorangkir, 2004). Bank berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang surplus dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau defisit (Simorangkir, 2004). Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan yang menjual kepercayaan dan jasa, setiap bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah baru, memperbesar dana-dananya dan juga memperbesar pemberian kredit dan jasa-jasanya (Simorangkir, 2004).

Perbankan merupakan sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Mutamimah Siti Nur Zaidah Chasanah, 2012). Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu : Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan

tingkat bunga tertentu. Dan Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Syafi'i Antonio (2001, 34) menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional , yaitu :

Pada bank syariah Melakukan investasi-investasi yang halal saja sedangkan pada bank konvensional Investasi yang halal dan haram , bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa pada bank konvensional memakai perangkat bunga, pada bank syariah mengenal prinsip profit dan falah oriented pada bank konvensional prinsip profit oriented saja , pada bank syariah hubungan dengan

nasabah dalam bentuk kemitraan sedangkan pada bank konvensional hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor, penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah sedangkan pada bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis.

Pada bank syariah hubungan antara bank dengan nasabah adalah kemitraan antara penyandang dana dengan pengelola dana (Mutamimah Siti Nur Zaidah Chasanah, 2012). Pemodal/pemilik modal (penyandang dana) yaitu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya (*mudharib*) untuk diperdagangkan (Sayyid Sabiq, 2006.) sedangkan pengusaha (*mudharib*) atau pengelola dana adalah pihak yang menjalankan suatu aktivitas atau usaha dari dana (modal) tersebut (Lewis dan Algaoud,2004) . Salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus disebut pembiayaan (syafi'I Antonio:2001). Bank harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat (Mokhtar et al., 2005). Rahmawulan (2008) menjelaskan bahwa kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan menghadapi resiko besar yang perlu diperhatikan supaya dapat diambil keputusan. Salah satu produk perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan menghadapi resiko pembiayaan bermasalah, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta dikelola secara tepat.

Non Performing Financing (NPF) merupakan ukuran pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus (Mares Suci Ana Popita,2013). NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah (Mares Suci Ana Popita,2013). Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa (Mares Suci Ana Popita,2013).

Menurut Edy Setiadi (2014), Direktur Eksekutif Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) porsi asset bank syariah menurun menyebabkan beberapa bank secara internal sedang dalam konsolidasi dalam rangka menjaga pertumbuhan non performing finance (NPF) yang memburuk.

Sementara ini dikutip dari Jakarta, CNN Indonesia Selasa, 17/05/2016 -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengaku tidak khawatir terhadap tren kenaikan rasio kredit macet (non performing loan/NPL) perbankan selama kuartal I 2016. Muliaman beralasan angka NPL industri perbankan secara rata-rata saat ini masih 2,8 persen atau masih di bawah ketentuan yakni 5 persen. "Lalu peningkatan (NPL) itu karena faktor pembagiannya yang mengalami penurunan, yaitu pertumbuhan kredit yang mengalami penurunan,

karena demand relatif menurun di kuartal pertama," kata Muliaman di Jakarta, Selasa (17/5). Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia juga menyoroti kinerja pembiayaan bermasalah (NPF) yang dialami perbankan syariah, di mana sampai Februari 2016 lalu angkanya tembus 5 persen. "Sebetulnya apa yang dialami bank syariah sama saja dengan bank lain. Intinya sisa-sisa 2015, akibat dari tekanan ekonomi yang luar biasa berat, pengusaha juga akan begitu," kata Muliaman.

Kendati demikian ia mengaku belum ada bank yang masuk dalam pengawasan OJK akibat tingginya kredit macet. Namun ia meminta perbankan konvensional maupun syariah untuk fokus melakukan perbaikan kualitas aset yang dimiliki salah satunya dengan merestrukturisasi kredit bermasalah yang tercatat.

Menurut Mahmoedin (2002) dalam Rahmawulan (2008), indikasi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (Account Attitudes), perilaku kegiatan bisnis (Business Activities Attitudes), perilaku nasabah (Customer Attitudes), dan perilaku makroekonomi (Economic Macro Attitudes). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh tiga unsur, yakni dari (1) pihak bank itu sendiri (kreditur), (2) dari pihak debitur serta (3) diluar pihak kreditur dan debitur tersebut. Faktor kreditur merupakan faktor yang disebabkan oleh kinerja bank yang bersifat mikro ekonomi, sedangkan faktor debitur merupakan faktor dari pengguna dana sedangkan faktor diluar keduanya merupakan faktor yang bersifat makroekonomi.

Menurut Martono dan Agus Harjito (2008), inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada

penurunan penjualan. Penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan return perusahaan. Penurunan return yang terjadi akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran kredit. Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat menimbulkan kualitas kredit semakin buruk bahkan terjadi kredit macet (Taswan, 2006) sehingga meningkatkan angka Non-Performing Financing. Krisis ekonomi tahun 1997 dan tahun 2008 menyebabkan lonjakan inflasi, sehingga membuat bank Indonesia membuat kebijakan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini membuat bank umum selektif dan hati-hati dalam memberikan kredit untuk mengantisipasi lonjakan NPL.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Menurut Martono dan Agus Harjito (2008), inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan penjualan. Penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan return perusahaan. Penurunan return yang terjadi akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran kredit. Pembayaran angsuran yang semakin

tidak tepat menimbulkan kualitas kredit semakin buruk bahkan terjadi kredit macet (Taswan, 2006) sehingga meningkatkan angka Non-Performing Loan.

Edy Setiadi (2014), Direktur Eksekutif Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan pangsa aset perbankan syariah di akhir Oktober 2014 justru lebih sedikit jika dibandingkan Oktober 2013 yang sebesar Rp 229,55 triliun atau 4,86% dari total aset perbankan. BI pada akhir tahun 2013 menargetkan porsi aset bank syariah sebesar 5,25%–6,25% dari total aset bank umum konvensional. Hal ini terjadi karena ekonomi sektor riil pada tahun 2014 kurang kondusif, termasuk bagi perbankan syariah agar bisa tumbuh.

Faktor penyebab kredit bermasalah eksternal yang direpresentasikan inflasi oleh hasil penelitian Nafis (2008), Rahmawulan (2008), dan Ihsan (2011) diketahui bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Sedangkan dalam penelitian Padmantlyo (2011), Mutaminah (2012) dinyatakan berpengaruh negatif signifikan sedangkan dalam penelitian Mares Suci Ana Popita (2013) dinyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan bermasalah.

Sedangkan penyebab pembiayaan bermasalah dari bank itu sendiri terkait dengan karakteristik sistem yang ada di bank syariah. Rasio Bank Size diperoleh dari total assets yang dimiliki bank yang bersangkutan jika dibandingkan dengan total assets dari bank-bank lain (Ranjan dan Dahl, 2003). Assets disebut juga aktiva. Menurut Sastradiputra (2004), sisi aktiva pada bank menunjukkan strategi dan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan tempat pengumpulan dan meliputi kas, rekening pada bank sentral, pinjaman jangka- pendek dan jangka panjang, dan

aktiva tetap.

Semakin besar aktiva atau assets yang dimiliki suatu bank maka semakin besar pula volume kredit yang dapat disalurkan oleh bank tersebut. Dendawijaya (2000) mengemukakan, semakin besar volume kredit memberikan kesempatan bagi pihak bank untuk menekan tingkat spread, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat lending rate (bunga kredit) sehingga bank akan lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan kepada nasabah yang membutuhkan kredit. Tingkat bunga kredit yang rendah dapat memacu investasi dan mendorong perbaikan sektor ekonomi. Tingkat bunga kredit yang rendah juga memperlancar pembayaran kredit sehingga menekan angka kemacetan kredit (Permono dan Secundatmo, 1993).

Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Rajiv Ranjan dan Sarat Chandra Dahl (2003) bahwa semakin besar ukuran bank maka semakin kecil tingkat Non-Performing Financing,

Asset disebut juga aktiva . Asset merupakan sumberdaya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya tersebut dapat berupa benda yang mempunyai wujud fisik, seperti kas dan bahan habis pakai, atau benda yang tak berwujud tapi memiliki nilai, seperti hak paten. (Dendawijaya :2000). Assets disebut juga aktiva. Menurut Sastradipura (2004), sisi aktiva pada bank menunjukkan strategi dan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan tempat pengumpulan dan meliputi kas, rekening pada bank sentral, pinjaman jangka- pendek dan jangka panjang, dan aktiva tetap. Manajemen aktiva bank ialah manajemen yang berhubungan dengan alokasi dana ke dalam kemungkinan investasi. Alokasi dana ke dalam investasi perlu direncanakan, diorganisasi, diarahkan, dan diawasi agar tujuannya dapat

tercapai. Pengelompokan aktiva dilihat dari sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu: Aktiva Tidak Produktif Meliputi : alat-alat likuid dan giro bank pada bank-bank lain dan aktif tetap dan inventaris. Disebut aktiva tidak produktif karena aktiva ini tidak menghasilkan laba atau rugi. Aktiva Produktif Meliputi : kredit jangka pendek dan kredit jangka panjang, deposito pada bank lain, call money, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain di dalam dan diluar negeri dan penyertaan modal.

Semakin besar aktiva atau assets yang dimiliki suatu bank maka semakin besar pula volume kredit yang dapat disalurkan oleh bank tersebut. Dendawijaya (2000) mengemukakan, semakin besar volume kredit memberikan kesempatan bagi pihak bank untuk menekan tingkat spread, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat lending rate (bunga kredit) sehingga bank akan lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan kepada nasabah yang membutuhkan kredit. Tingkat bunga kredit yang rendah dapat memacu investasi dan mendorong perbaikan sektor ekonomi. Tingkat bunga kredit yang rendah juga memperlancar pembayaran kredit sehingga menekan angka kemacetan kredit (Permono dan Secundatmo, 1993).

Edy Setiadi, Direktur Eksekutif Perbankan Syariah mengatakan pangsa aset perbankan syariah di akhir Oktober 2014 justru lebih sedikit jika dibandingkan Oktober 2013 yang sebesar Rp 229,55 triliun atau 4,86% dari total aset perbankan. BI pada akhir tahun 2013 menargetkan porsi aset bank syariah sebesar 5,25%–6,25% dari total aset bank umum konvensional.

Pada penelitian sebelumnya menyatakan faktor total aset yang dimiliki oleh bank dalam penelitian Imaduddin (2006) menunjukkan pengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sedangkan dalam penelitian Mares

Suci Ana Popita (2013) Variabel total Aset berpengaruh signifikan Negatif terhadap NPF. Berdasarkan tingkat fluktuasi NPF yang cukup tinggi serta adanya gap dari hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS PENGARUH FAKTOR INFLASI DAN TOTAL ASSET TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan penjelasan pada latar belakang penelitian maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan Non Performing Finance (NPF) cenderung menurun.
- 2) Inflasi pada bank syariah fluktuasi tidak beraturan sehingga sulit diprediksi.
- 3) Total Asset bank syariah fluktuasi kurang beraturan sehingga beresiko pada NPL perbankan.
- 4) Pertumbuhan Non Performing Finance (NPF) yang memburuk akibat porsi aset bank syariah yang menurun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian dan Identifikasi Masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh inflasi terhadap Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah.
- 2) Seberapa besar pengaruh Total Asset terhadap Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah.

- 3) Seberapa besar pengaruh faktor inflasi dan total asset terhadap Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah diatas maka Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengkaji dan menganalisa besar pengaruh inflasi terhadap Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah.
- 2) Mengkaji dan menganalisa besar pengaruh Total Asset terhadap Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah.
- 3) Mengkaji dan menganalisa besar pengaruh faktor inflasi dan total asset terhadap Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah, maupun masalah pada Inflasi dan Total Asset pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti penelitian yang dihasilkan, maka fenomena pada Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah dapat diperbaiki dengan kondisi inflasi dan total asset yang baik.

1.1.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

- 1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam ilmu Akuntansi Syariah.
- 2) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan dan untuk menguji kembali penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang melakukan pengembangan ataupun pembuatan penelitian dalam hal yang sama yakni aspek pada Bank Umum Syariah.